



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN(LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pematangsiantar
2025



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	DASAR HUKUM SKPD.....	1
1.3	VISI DAN MISI OPD	6
BAB 2	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
	DAERAH 8	
2.1	Perjanjian Kinerja.....	8
2.2	Program dan Kegiatan Tahun 2024	9
BAB 3	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12
3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan	12
3.2	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	15
3.4	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023	26
BAB 4	PENUTUP.....	28

1.1 DASAR HUKUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar dan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah di Kota Pematangsiantar, Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kapasitas Lingkungan Hidup
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar meliputi melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan daya dukung dan daya tampung, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, kemitraan lingkungan serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup

- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan;
- d. perumusan kebijakan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- e. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan
- f. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan pengelolaan persampahan
- g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, pencemaran dan kerusakan;
- h. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. pengelolaan dan melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan administrasi kantor, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan, pengelolaan, keuangan, retribusi pelayanan kebersihan dan pelaporan;
- n. pengelolaan perijinan dan rekomendasi bidang lingkungan hidup
- o. pelaksanaan perencanaan, penelitian, pengembangan pengelolaan dan pengendalian kebersihan di dalam kota, di luar kawasan pasar, taman, lapangan, kompleks perumahan, pabrik, kompleks pendidikan, komplek militer, komplek kesehatan dan komplek olahraga;
- p. penyelenggaraan penetapan, penagihan, pengutipan, pembukuan dan penyetoran hasil retribusi pelayanan kebersihan;
- q. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan persampahan;
- r. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan;
- s. pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang sumber daya mineral;
- t. pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- u. penyelenggaraan pengelolaan, perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, serta pemberdayaan masyarakat dan daerah penyangga Taman Hutan Raya (Tahura), Hutan Kota, dan Daerah Aliran Sungai (DAS);

- v. penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan kota meliputi jalan, saluran dan sarana umum serta pelaksanaan pengawasan pengelolaan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) serta pengelolaan unit pelaksana teknis dinas; dan
- w. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DLH



1.2 Data Kepegawaian OPD

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)	KETERANGAN
1	Jumlah Pegawai dirinci menurut Golongan a. Golongan IV b. Golongan III c. Golongan II d. Golongan I e. THL	314 8 22 22 7 255	
2	Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan : a. S2, S3 b. S1 c. D3 d. SMU e. SLTP f. SD	314 7 39 8 153 44 63	
3	Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV	8 1 5 2	
4	Jumlah Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional : a. Jabatan Fungsional Perencana b. Jabatan Fungsional Pengendali Lingkungan c. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan	7 1 5 1	
5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender a. Laki-laki b. Perempuan	314 264 56	
6	Jumlah PNS Keseluruhan	56	
7	Jumlah Tenaga Harian Lepas`	255	
	Jumlah Total	314	

1.3 VISI DAN MISI OPD

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kota Pematangsiantar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2022 – 2027), yaitu Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat Sejahtera dan Berkualitas”

Terwujudnya adalah suatu kondisi yang diharapkan pada lima tahun ke depan untuk terlaksana (KKBI)

Sehat adalah Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau pasca pandemic covid – 19.

Sejahtera adalah meningkatkan perlindungan masyarakat dan social ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan dunia usaha, kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan membuka akses investasi serta meningkatkan inovasi usahan jasa, dagang dan insdusti, khususnya masa dan atau pasca peandemic covid-19.

Berkualitas meningkatkan potensi sumber daya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata Kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serrta konsisten dalam melayani, implementasi regualasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai sub pusat perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuann oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 “Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”.

Ditempuh melalui Misi Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai lokal wisdom dan keberagaman yang berkualitas
2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, umkm dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemic dan atau paska pandemic covid-19
3. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.
4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota guna pencapaian siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.
5. Mewujudkan Kota Berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mengemban Misi 5 RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 yaitu Mewujudkan Kota Berkualitas melalui Penataan Ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan yang berkelanjutan, dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Misi ke-5 RPJMD Kota Pematangsiantar memiliki tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang berwawasan lingkungan.

Tabel 1. 1 Peran DLH dalam Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Pematangsiantar

Visi : Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan	Meningkatkan kualitas infrastruktur kota berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya keseimbangan Lingkungan	1. IKLH 2. Persentase penanganan sampah

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar untuk mencapai target kinerja indikator sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan pengendalian pencemaran air	Indeks Kualitas Air	54,01
2	Meningkatkan pengendalian pencemaran udara	Indeks Kualitas Udara	84,50
3	Meningkatkan Pengendalian Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan lahan	28,46
4	Meningkatkan Pelayanan Penanganan Sampah	Persentase penanganan Sampah	71%
5	Meningkatkan Pelayanan Pengurangan Smpah	Persentase Pengurangan sampah	28%
6	Meningkatkan layanan administrasi penunjang bidang Lingkungan hidup	Nilai SAKIP	8
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi (Briket dari Sampah)	1

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.094.929.978
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	297.350.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	739.496.698
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	44.300.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH)	35.450.000
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	92.691.420
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.768.000
8	Program Pengelolaan Persampahan	13.027.466.412
	Jumlah	22.337.452.508

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
 WALI KOTA PEMATANGSIANTAR dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp. A	 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANGSIANTAR DEDY TUNASTO SETIAWAN, SH PIBIDINA UTAMA MUDA NIP. 19920921 199103 1 003

2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.976.166.508
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.976.166.508
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	23.976.166.508
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.094.929.978
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.471.944.465
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.186.044.465
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	285.900.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.880.513
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.831.536
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.747.301
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.457.054
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.136.320
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.617.302
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.491.000
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	183.600.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.420.000
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.990.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465.430.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.685.000
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	66.940.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.610.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.135.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	297.350.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	297.350.000
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	297.350.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	739.496.698
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	739.496.698
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.091.000
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	126.040.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	534.365.698
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	44.300.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	44.300.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	44.300.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.450.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.450.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	7.500.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	27.950.000

Kode	Urusan/Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	92.691.420
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.691.420
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	92.691.420
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.768.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.768.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.768.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.666.180.412
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	14.666.180.412
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.638.256.612
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	13.027.923.800

2.3 Pendapatan/Retribusi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar mengelola Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi pelayanan Persampahan. Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Target (Rp)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.751.090.000

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian Target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dalam perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Kriteria
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	54,01	70	129,61	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Udara	84,50	88,65	104,91	Sangat Tinggi
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,46	22,44	78,85	Tinggi
	Persentase Pengelolaan Sampah	99%	97,12%	98,10%	Sangat Tinggi
Meningkatkan Layanan Penunjang Urusan Lingkungan Hidup	SAKIP	B	B	100%	Sangat tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	77,48	96,85	Sangat Tinggi
	Inovasi	1	1	100%	Sangat Tinggi

Indikator Sasaran 1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) diperoleh dari analisis data kualitas air sungai yang dipantau pada 2 (dua) sungai di Kota Pematangsiantar yaitu Sungai Bahapal dan Bah Bolon dipantau 2 (dua) kali setahun. Parameter untuk Indeks Kualitas Air terdiri dari pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat, minyak dan lemak. Hasil perhitungan indeks kualitas air sungai di Kota

Pematangsiantar sebesar 70,00 sedangkan target indeks kualitas air Kota Pematangsiantar sebesar 54,01.

Indikator Sasaran 2. Indeks Kualitas Udara

Perhitungan Nilai IKU menggunakan 2 (dua) parameter NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. IKU Kota Pematangsiantar dihitung dari data hasil pengukuran udara ambien dengan metode passive sampler pada 4 titik pantau mewakili wilayah transportasi, industri, permukiman dan perkantoran dengan kriteria persyaratan yang telah ditentukan. Indeks Kualitas Udara dihitung melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Berdasarkan hasil perhitungan data kualitas udara ambien dengan metode passive sampler diperoleh nilai indeks kualitas udara sebesar 88,65 memenuhi target Renstra (84,5).

Indikator 3 Sasaran 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Data yang digunakan untuk menghitung IKTL adalah olah data citra satelit dan hasil kajian dan perhitungan luas RTH berdasarkan Permen ATR Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Realisasi IKTL Tahun 2023 sebesar 22,44 dari target 28,46.

Tabel 2. 2 Data RTH Kota Pematangsiantar

NO	KAB/KOTA	Pemantauan	IKTL
		RTH ^(HA)	RTH ^(HA)
1	Kota Pematangsiantar	2406.68	22,44

Indikator 4 Sasaran 1 Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pengukuran kinerja pelayanan pengelolaan sampah dihitung dengan pendekatan rata-rata sampah yang dihasilkan per orang, penduduk Kota Pematangsiantar rata-rata menghasilkan sampah 0,5 kg/hari. Estimasi sampah yang dihasilkan untuk Kota Pematangsiantar sebesar 0,5 kg per hari berdasarkan ketentuan dari kategori kota, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar Tahun 2024 sebanyak 321.450 jiwa, maka timbulan sampah 58.826 ton/tahun. Data Pengelolaan Sampah dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3 Tabel Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Pematangsiantar

Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	58.826	100%
Timbulan Sampah yang dikelola (Ton/Tahun)	57.127	97,12%

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	Urusan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah 100%	Persentase pengelolaan sampah	1. TPA Overload 2. Jumlah Alat Berat di TPA kurang	1. Sewa Alat Berat
				Pengelolaan Sampah				Peningkatan peranserta warga sekolah dalam pengurangan sampah
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan	Kurangnya kapasitas kelembagaan KSM dalam pengurangan Sampah	Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan untuk menetapkan strategi pengurangan sampah
				Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah		51 unit armada pengangkutan terpelihara; 226 honor tenaga kebersihan; sewa alat bera	Kurangnya alat berat untuk penataan sampah di TPA	
				Program Pengendalian Pencemaran dan			Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan	Peningkatan pengawasan

NO	Ururan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Perusakan Lingkungan Hidup			lingkungan yang sesuai dengan PUU LH	terhadap usaha dan/atau kegiatan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pembentukan Kampung Iklim	-	Kurangnya peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan hidup	Penambahan Anggaran untuk peningkatan Pendidikan, penyuluhan Lingkungan hidup untuk Masyarakat, lembaga Pendidikan, perusahaan
				Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengujian kualitas air sungai sebanyak 6 titik dan kualitas udara 8 titik	Pengujian kualitas air sungai sebanyak 6 titik dan kualitas udara 8 titik		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	2 orang tenaga analis, pengadaan bahan kimia	2 orang tenaga analis, pengadaan bahan kimi	Laboratorium belum terakreditasi	Memenuhi point – poin penilaian akreditasi laboratorium.
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100% dokumen KRP yang diKLHScan	100% dokumen KRP yang diKLHScan		

NO	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	100% dokumen KRP yang diKLHScan	100% dokumen KRP yang diKLHScan		
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	2 dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD	2 dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD		
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	IKTL 28,46	IKTL 22,44	Kurangnya Lahan sebagai RTH Kota	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	IKTL 28,46	IKTL 22,44		
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1000 bibit pohon, 100 % rekomendasi permohonan penebangan/pencabangan yang ditindaklanjuti; dokumen pemetaan lahan	1000 bibit pohon, 100 % rekomendasi permohonan penebangan/pencabangan yang ditindaklanjuti ; dokumen pemetaan lahan		
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	85% ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar	60,53% ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan		

NO	Urusan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
						Oleh pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar		
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	85% ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar	60,53% ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar		
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 % persetujuan lingkungan yang diterbitkan	100% persetujuan lingkungan yang diterbitkan		
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di	65 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	76 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		

NO	Urusan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
				Proram Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20 Lembaga pendidikan	0		
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/Kota	100% Pengaduan ditindaklanjuti	0		
				Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarkat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100% Pengaduan ditindaklanjuti	0		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100% Pengaduan ditindaklanjuti	100% Pengaduan ditindaklanjuti		
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kab/Kota	100% Pengaduan ditindaklanjuti	100% Pengaduan ditindaklanjuti		
				Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100% Pengaduan ditindaklanjuti	100% Pengaduan ditindaklanjuti		
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				

NO	Urusan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1106 orang/bulan	1106 orang/bulan		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	156 orang/bulan	156 orang/bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan/kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket		
				Penyediaan peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Bahan Logistik kantor	1 paket	1 paket		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	1 Paket		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248 Orang/hari	900 orang/hari		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

NO	Ururan Pamarintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 laporan/bulan	84 laporan/bulan		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7259 orang/bulan	7129 orang/bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
				Penyediaan jasa, pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit	2 unit		
				Penyediaan jasa, pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	69 unit		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Pemeliharaan Perizinan alat Besar	2 unit	2 unit		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20 unit	20 uni		

3.3 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Realisasi Kinerja Pendapatan Tahun 2024 sebesar 45,12% retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan

No	Jenis pendapatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	5.751.090.000	2.594.758.250	45,12

Analisis Capaian Kinerja Pendapatan Tahun 2024

Realisasi Pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024, pendapatan yang dikelola pada Dinas Lingkungan Hidup Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Realisasi Kinerja Pendapatan Tahun 2024 sebesar 45,12%.

Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Realisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan DLH Tahun 2024

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU		
		Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.976.166.508	23.129.434.492	96,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	23.976.166.508	23.129.434.492	96,47
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEMATANG SIANTAR	23.976.166.508	23.129.434.492	96,47
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.094.929.978	7.645.007.565	94,44

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU		
		Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.471.944.465	6.112.861.186	94,45
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.186.044.465	5.851.623.186	94,59
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	285.900.000	261.238.000	91,37
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.880.513	819.851.325	95,34
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.831.536	14.291.000	96,36
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.747.301	72.059.830	99,05
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.457.054	11.906.442	88,48
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.136.320	13.511.000	46,37
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.617.302	58.295.500	90,22
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.491.000	468.387.553	97,28
2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	183.600.000	181.400.000	98,80
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.420.000	523.377.039	94,06
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.990.000	61.873.039	68,00
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465.430.000	461.504.000	99,16
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.685.000	188.918.015	91,40
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.940.000	57.534.000	85,95
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.610.000	115.796.015	94,44
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.135.000	15.588.000	90,97
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	297.350.000	237.250.000	79,79
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	297.350.000	237.250.000	79,79

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU		
		Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	297.350.000	237.250.000	79,79
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	739.496.698	644.537.227	87,16
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	739.496.698	644.537.227	87,16
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	79.091.000	63.025.000	79,69
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	126.040.000	118.728.500	94,20
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	534.365.698	462.783.727	86,60
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	44.300.000	40.011.000	90,32
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	44.300.000	40.011.000	90,32
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	44.300.000	40.011.000	90,32
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.450.000	30.190.000	85,16
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.450.000	30.190.000	85,16
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	7.500.000	4.500.000	60,00
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	27.950.000	25.690.000	91,91

KODE	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU		
		Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Lingkungan Hidup			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	92.691.420	-	0,00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.691.420	-	0,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	92.691.420	-	0,00
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.768.000	-	0,00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	5.768.000	-	0,00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	5.768.000	-	0,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	14.666.180.412	14.532.438.700	99,09
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	14.666.180.412	14.532.438.700	99,09
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.638.256.612	1.634.573.000	99,78
2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	13.027.923.800	12.897.865.700	99,00

Pagu anggaran program dan kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp.23.976.166.508,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapn rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.129.434.492 (dua puluh tiga milyar

seratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) atau sama dengan 96,47%.

3.5 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan

1. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan untuk mencapai target indikator sasaran dinas melalui pelaksanaan pengangkutan sampah (Armada Pengangkutan yang terpelihara, tenaga kebersihan, dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah)

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Dilaksanakan dengan melaksanakan pemantauan kualitas Lingkungan hidup, diantaranya air sungai dan udara serta pemenuhan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air pada laboratorium Lingkungan Hidup.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Merupakan program untuk mendukung peningkatan kualitas RTH melalui pengadaan bibit dan penanaman pohon untuk meningkatkan kualitas RTH

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH

5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup

6. Program Pengelolaan Pengaduan

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Kota Pematangsiantar sesuai dengan Visi dan Misi Wali Kota Pematangsiantar melalui tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023, sebagai berikut:

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2023

Rekomendasi LKPJ 2023	Tindak Lanjut	Tujuan /Masalah yang diselesaikan
Diminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui dinas Lingkungan Hidup	Kota Pematangsiantar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kegiatan	Meminimalkan bahaya untuk warga yang

Rekomendasi LKPJ 2023	Tindak Lanjut	Tujuan /Masalah yang diselesaikan
dalam hal Pengelolaan Sampah di TPA yang semakin menimbulkan ancaman Kesehatan dan Keselamatan warga yang mengais rezeki di TPA agar menerapkan standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan	pelayanan pengelolaan sampah melalui pengangkutan sampah dari TPS dan penataan sampah di TPA (ditata agar sampah dari truk pengangkutan dapat dibuang), namun karena keterbatasan Alat Berat maka penataan sampah kurang optimal	mengais rezeki di TPA
Diminta kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar Melalui Dinas Lingkungan Hidup agar segera menggunakan lahan yang sudah dibeli Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk mengatasi TPA yang sudah over Kapasitas	Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Lingkungan terus berupaya untuk memberikan pelayanan penanganan sampah di TPA yang sudah overload, pemanfaatan lahan belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA.	Memenuhi persyaratan teknis pengelolaan TPA Kab/Kota
Diminta Kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan koordinasi Lintas OPD terkait pengelolaan sampah di sekitar Pasar Dwikora dan Pasar Horas agar tidak tumpang tindih	Dinas Lingkungan Hidup telah bekerjasama dengan PD Pasar Horas Jaya bahwa pengelolaan sampah di Kawasan Pasar Horas dan Dwikora merupakan tanggung jawab PD Pasar Horas Jaya sedangkan Dinas Lingkungan Hidup mengangkut kontainer sampah pada waktu dan tempat yang telah disepakati	Efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sampah di Kota Pematangsiantar

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar sudah berupaya dengan optimal

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah:

- a. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah terutama di TPA
- b. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
- c. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- d. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di bidang pengelolaan lingkungan hidup baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
- e. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
- f. Merintis pembentukan sistem pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pematangsiantar, Februari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEMATANGSIANTAR

DENY JUNASTO SETIAWAN, SH
REMBINA UTAMA MUDA
NIP.19710921 199109 1 002